

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN MELALUI JAKSA PENGACARA NEGARA
(STUDI KASUS PT. MATAHARI SENTOSA JAYA)**

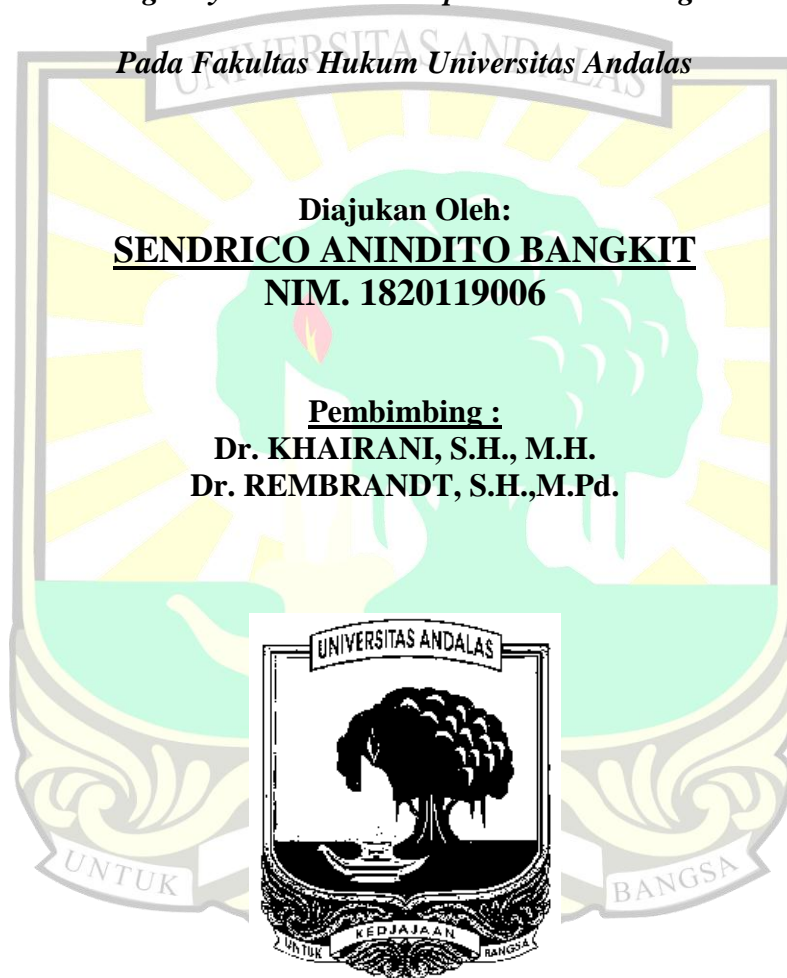
TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Diajukan Oleh:
SENDRICO ANINDITO BANGKIT
NIM. 1820119006

Pembimbing :
Dr. KHAIRANI, S.H., M.H.
Dr. REMBRANDT, S.H.,M.Pd.



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN MELALUI JAKSA PENGACARA NEGARA
(STUDI KASUS PT. MATAHARI SENTOSA JAYA)**

(Sendrico Anindito Bangkit, 1820119006, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

PT.Matahari Sentosa Jaya yang sudah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk membayar iuran khususnya mengenai hak Jaminan Sosial yang berkaitan langsung dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang pada dasarnya merupakan program Negara dan menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai lembaga Jaminan Sosial Nasional dalam pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dan terkait perjanjian kerja tentang hak dan kewajiban jaminan sosial antara PT.Matahari Sentosa Jaya dengan tenagakerjanya, yang kemudian PT.Matahari Sentosa Jaya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga terjadinya tunggakan iuran. Bagaimanakah terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan? serta bagaimanakah penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cimahi?. Pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis empiris, dimana pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai perundangan yang berhubungan dengan permasalahan, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan menganalisis hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi didalam masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data yang diperoleh, baik bahan primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari pembahasan atas rumusan masalah yang dijelaskan pada penelitian ini ditarik kesimpulan. (1) Terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang berawal PT. Matahari Sentosa Jaya tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik berdasarkan faktor internal yakni ketidakmampuan manajemen, kekurangan modal sedangkan faktor eksternal berupa ekonomi, sosial, pelanggan yang menyebabkan tunggakan iuran dan denda. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan teguran dan sanksi administrasi tetapi tidak optimal, yang kemudian meminta bantuan hukum dalam melakukan penagihan tunggakan iuran tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara dalam rangka pemulihan keuangan/ kekayaan Negara, selanjutnya terkait kesepakatan pelunasan tunggakan iuran dan denda didasarkan kepada aturan dalam hukum perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan terkait lainnya. (2) Penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Jaksa Pengacara Negara menempuh langkah yang sesuai aturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan cara BPJS Ketenagakerjaan memberi kuasa berupa Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk menyelesaikan tunggakan iuran, sehingga tercapainya kesepakatan pelunasan tunggakan iuran dan denda dalam rangka pemulihan keuangan/ kekayaan Negara

Kata Kunci : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Jaksa Pengacara Negara, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**SETTLEMENT OF LABOR DUE DUE ADMINISTRATIVE AGENCY (BPJS)
THROUGH STATE OFFICIAL LAWYERS
(CASE STUDY PT. MATAHARI SENTOSA JAYA)**

(Sendrico Anindito Bangkit, 1820119006, Master Degree Program of Law Andalas Universty)

ABSTRACT

PT. Matahari Sentosa Jaya, which has become a participant in the Social Security Administration (BPJS) for Employment, has an obligation to pay contributions, especially regarding Social Security rights which are directly related to the National Social Security System which is basically a State program and carries out the mandate of Law Number 40 2004 concerning the National Social Security System and the Social Security Administering Body (BPJS) for Employment as a public legal entity based on Law Number 24 of 2011 as a National Social Security institution in the executor of the National Social Security System and related to work agreements regarding rights and social security obligations between PT. Matahari Sentosa Jaya and its employees, which then PT. Matahari Sentosa Jaya cannot carry out their obligations so that the arrears in dues occur. How is the arrears in dues at PT. Matahari Sentosa Jaya to the Employment Social Security Administration (BPJS)? and how is the settlement of dues arrears at PT. Matahari Sentosa Jaya to the Social Security Administering Body (BPJS) for Employment by the Cimahi State Attorney's Office? The juridical empirical approach to the problem is used, where the juridical approach is used to analyze various laws related to the problem, while the empirical approach is used to analyze the law by looking at the legal reality that occurs in society. The nature of the research used in this research is descriptive. The data collection techniques used were literature study and interviews. primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. All data obtained, both primary, secondary and tertiary materials, were then analyzed qualitatively juridical. From the discussion of the problem formulations described in this study, conclusions are drawn. (1) The arrears of dues at PT. Matahari Sentosa Jaya towards BPJS Ketenagakerjaan which started with PT. Matahari Sentosa Jaya is not able to run the company properly based on internal factors, namely management inability, lack of capital, while external factors in the form of economy, social, customers cause arrears in dues and fines. BPJS Ketenagakerjaan has administered warnings and sanctions but not optimal, which then asks for legal assistance in collecting the arrears of the dues from the State Attorney. in the framework of restoring State finances / assets, furthermore related to the agreement to settle arrears in dues and fines based on the rules in the agreement law in accordance with the Civil Code and other related regulations. (2) Settlement of unpaid dues at PT. Matahari Sentosa Jaya to BPJS Ketenagakerjaan. The State Attorney General takes steps in accordance with the rules in carrying out the duties and functions of the Public Prosecutor's Office in the Civil and State Administration by means of BPJS Ketenagakerjaan to authorize a Special Power of Attorney to the State Attorney through alternative dispute resolution efforts in the form of negotiations to settle outstanding dues, so that an agreement is reached repayment of dues and fines arrears in the context of financial recovery / State assets

Key words: Social Security Administering Bodies (BPJS) for Employment, State Attorneys, Alternative Dispute Resolution.